

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
(STUDI PADA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DI
KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**NATASYA CHINTYA
NPM 2256041030**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
(STUDI PADA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DI
KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

NATASYA CHINTYA

Skripsi

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) (STUDI PADA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DI KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

NATASYA CHINTYA

Masalah gizi anak usia sekolah dan tingginya prevalensi stunting mendorong pemerintah Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan nasional strategis yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini mengkaji implementasi program MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Kecamatan Sukabumi menjadi perhatian akibat kasus keracunan siswa akibat kontaminasi bakteri *Escherichia coli*. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program MBG belum berjalan optimal akibat ketidaksesuaian penerapan SOP, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pemantauan, dan koordinasi antarorganisasi yang belum efektif. Faktor penghambat implementasi meliputi ketidakpatuhan terhadap standar, ketimpangan kapasitas pemahaman pelaksana, lemahnya monitoring dan pengawasan, keterlambatan distribusi makanan, kualitas makanan yang tidak konsisten, serta ketidakstabilan ketersediaan dan harga bahan pangan lokal.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Makan Bergizi Gratis, SPPG, Van Meter dan Van Horn, Ketahanan Pangan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL (MBG) PROGRAM (STUDY OF THE NUTRITIONAL FULFILLMENT SERVICE UNIT IN SUKABUMI SUB-DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY)

By

NATASYA CHINTYA

Nutritional problems among school-age children and the high prevalence of stunting have encouraged the Indonesian government to launch the Free Nutritious Meal (MBG) Program as a strategic national policy regulated under Presidential Regulation Number 83 of 2024 and Presidential Regulation Number 115 of 2025. This program aims to improve community nutritional status in support of the Indonesia Emas 2045 vision. This study examines the implementation of the MBG Program at the Nutritional Fulfillment Service Unit (SPPG) in Sukabumi District, Bandar Lampung City, and identifies the factors inhibiting its implementation. Sukabumi District became a public concern following cases of student food poisoning caused by Escherichia coli contamination. This study applies the policy implementation model of Van Meter and Van Horn using a qualitative approach and a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, while data analysis employed the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the implementation of the MBG Program has not yet been optimal due to non-compliance with Standard Operating Procedures (SOPs), limited human resources, weak monitoring systems, and ineffective interorganizational coordination. The inhibiting factors include non-compliance with standards, disparities in implementers' capacity and understanding, weak monitoring and supervision systems, delays in food distribution, inconsistent food quality, and instability in the availability and prices of local food ingredients.

Keywords: Program Implementation, Free Nutritious Meal Program, SPPG, Van Meter and Van Horn, Food Security

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS (MBG) (STUDI PADA
SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN
GIZI DI KECAMATAN SUKABUMI
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Natasya Chintya

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2256041030

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197507202003121002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.
NIP. 197009142006042001

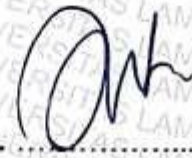
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 25 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Natasya Chintya

NPM 2256041030

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Natasya Chintya, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 2004. Penulis merupakan anak perempuan kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Bambang dan Ibu Maya Shinta. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) Yuri Desma Sari, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 6 Penengahan. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Melalui jalur SMMPTN Barat, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjalani masa studi, penulis tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (Himagara) dengan menjadi anggota bidang Hubungan Luar (Hublu). Pada tahun 2023 hingga 2024, penulis bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP dengan menjadi anggota bidang Kajian dan Strategis (Kastrat). Dalam peran sebagai anggota Kastrat BEM FISIP Universitas Lampung, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan kepanitiaan, seperti kepanitiaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PKKMB) FISIP tahun 2023 hingga tahun 2024. Pengalaman tersebut memberikan penulis banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang tak terlupakan.

Sebagai bagian dari proses pendidikan, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, serta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.”

(Bumi Manusia)

“If you’re going to let one stupid prick ruin your life, you’re not the girl I thought you were.”

(Legally Blonde)

“Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and deep heart. The really great wo-men must, I think, have great sadness on earth”

(Fyodor Dostoevsky)

“Don’t be a coconut. Don’t watch life, live it.”

(Julian Casablancas from The Strokes)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan penuh ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya akademik ini kepada:

Orang tua tercinta,

Papa dan Mama yang telah mencurahkan kasih sayang tiada batas, doa yang tiada henti, dan dukungan yang tak pernah surut di sepanjang perjalanan hidup penulis.

Kakak tersayang,

Kakak Hilmy yang selalu menjadi penyemangat dan sumber kebahagiaan dalam setiap langkah hidup penulis.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Sebagai wujud penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi mulia dalam mencerdaskan bangsa. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang telah kalian berikan. Setiap pembelajaran telah menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.

Almamater tercinta,

Universitas Lampung yang penulis banggakan

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan bimbingan-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam perjalanan akademik ini. Secara khusus, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, saran, masukan, dan nasihat yang telah bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang bapak berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjana ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk bapak.
2. Ibu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia meluangkan waktu,

memberikan arahan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kemudahan yang Prof berikan dalam proses skripsi yang penulis jalani. Semoga Prof dan keluarga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan untuk prof dan keluarga.

3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA., selaku Dosen Seminar Masalah Administrasi Publik. Terima kasih untuk pembelajaran dan saran yang bapak berikan untuk penulis, sehingga penulis berani mengambil judul skripsi yang saat ini dijadikan tugas akhir.
7. Seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran berharga yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Segala hal yang telah diberikan akan selalu menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menghadapi tantangan di masa depan.
8. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan atas segala bantuan, kesabaran, dan arahnya dalam pengurusan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
9. Seluruh informan penelitian. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga demi kelancaran penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan dalam berbagi informasi dan pengalaman sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang komprehensif dan akurat. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif para informan, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

10. Mama dan Papa. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Mama dan Papa yang selalu menjadi sumber kekuatan, dukungan, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materil, menjadi alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih karena selalu percaya, menguatkan, dan mendampingi penulis dalam setiap proses yang dilalui. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur yang panjang kepada Mama dan Papa. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
11. Oma dan Opa selaku kakek dan nenek yang sangat penulis cintai, terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini. Semoga oma dan opa selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, serta diberikan keberkahan dunia dan akhirat.
12. Paksu Wirman selaku paman penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum paman tercinta atas segala dukungan, nasihat, dan motivasi yang diberikan semasa hidupnya. Meskipun beliau tidak dapat menyaksikan penyelesaian skripsi ini, jasa dan kebaikannya akan selalu dikenang oleh penulis. Semoga almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi-Nya.
13. Ria Angelita Said. Sahabat yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, waktu, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena selalu hadir, baik dalam masa-masa bahagia maupun saat penulis menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran dan ketulusanmu telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang arti persahabatan yang tulus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, rezeki yang baik, kebahagiaan, serta kesuksesan dunia dan akhirat untukmu.
14. Sahabat penulis selama menempuh kuliah *My Trip My Adventure*: Nefringga, Abel, Jihan, Celo, Marini, Sherina, Winda, Eci, Tika, Rifat, dan

Zaidan. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah menemani penulis sejak semester pertama. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta berbagai pengalaman berharga yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, tulus, dan selalu hadir dalam suka maupun duka. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dalam meraih cita-cita, serta perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT.

15. Kepada *Dreamers Girls*, yaitu Rahma, Dhita, Michelin, Bening, dan Manda. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi serta menghadirkan berbagai kenangan berharga dalam proses perjalanan hidup penulis.
16. Teman-teman Kelas Mandiri A. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta berbagai pengalaman berharga yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan yang berkesan bagi penulis. Semoga segala usaha dan perjuangan yang telah kita tempuh dapat mengantarkan kita pada kesuksesan dan masa depan yang dicita-citakan.
17. Adel, Rini, Ulva, Bilham, Reval, dan Derra selaku teman KKN penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan KKN di Komering Agung. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh pengalaman dan pembelajaran berharga. Semoga kenangan dan pengalaman yang telah dilalui bersama dapat menjadi bekal untuk meraih kesuksesan di masa depan.
18. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu Nefringga, Celo, Anna, Bella, dan Rihha. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang diberikan selama pelaksanaan PKL. Terima kasih telah menjadi rekan

yang baik dan selalu memberikan semangat selama menjalani proses pembelajaran dan pengalaman di lingkungan kerja. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.

19. Keluarga Besar Ampatra 2022. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses belajar, bertumbuh, dan berjuang bersama dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Semoga segala usaha, perjuangan, dan cita-cita yang diperjuangkan dapat terwujud serta membawa kesuksesan di masa depan.
20. Teruntuk diri sendiri. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan menyelesaikan seluruh proses perkuliahan hingga tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah berbagai tantangan, keraguan, dan kesulitan yang dihadapi selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Pencapaian ini merupakan hasil dari usaha, doa, dan ketekunan yang telah diperjuangkan selama ini. Semoga diri ini senantiasa diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap langkah berikutnya serta tidak lupa untuk menghargai dan bangga atas segala proses yang telah berhasil dilalui.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik	14
2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan.....	15
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	15
2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan	16
2.4 Tinjauan tentang Program Makan Bergizi Gratis	24
2.5 Kerangka Berpikir Penelitian	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.7 Keabsahan Data	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	39
4.1.1 Latar Belakang Program MBG	39
4.1.2 Pelaksanaan Program MBG di Indonesia	41
4.1.3 Sasaran Program MBG	48
4.1.4 Mekanisme Pelaksanaan Program MBG di Tingkat Lokal	49
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bandar Lampung	52
4.2.2 Gambaran Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Asri Amanah Barokah Sukabumi	55
4.2.3 Gambaran Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Insan Sehat Mandiri	73
4.3 Hasil Penelitian	77
4.3.1 Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	77
4.3.2 Faktor Penghambat Implementasi Program MBG pada SPPG di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	121
4.4 Pembahasan.....	129
4.4.1 Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Studi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	129
4.4.2 Faktor penghambat implementasi Implementasi Program MBG di SPPG Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	159
V. KESIMPULAN DAN SARAN	170
5.1 Kesimpulan.....	170
5.2 Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIRAN.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persebaran Kasus Keracunan Program MBG di Provinsi Lampung.....	5
2. Daftar Penelitian Terdahulu	11
3. Data Informan Penelitian.....	32
4. Dokumentasi Penelitian.....	33
5. Tingkat Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan.....	40
6. Indikator Keterlaksanaan Program MBG di Satuan Pendidikan	43
7. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Program MBG.....	45
8. Sebaran SPPG di Kota Bandar Lampung.....	50
9. Daftar Penerima Manfaat SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah	59
10. Daftar Penerima Manfaat Program MBG di SPPG Yayasan Insan Sehat Mandiri	74
11. Jumlah Sumber Daya Manusia Pelaksana Program MBG di Kecamatan Sukabumi.....	91
12. Matriks Hasil Penelitian	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. 10 Provinsi Teratas Operasional SPPG di Indonesia	4
2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)	19
3. Model Implementasi Grindle (1980)	23
4. Model Implementasi Jones (1984)	24
5. Kerangka Pikir Program	25
6. Kerangka Berpikir	28
7. Komponene Analisis Data: Model Interaktif Miles & Huberman	36
8. Prelevansi Ketidakecukupan Komsumsi Pangan	40
9. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi	53
10. SPPG Sukabumi I Yayasan Asri Amanah Barokah	57
11. Struktur Organisasi SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah Sukabumi	72
12. SPPG Sukabumi indah Yayasan Insan Sehat Mandiri	73
13. Struktur Organisasi SPPG Yayasan Insan Sehat Mandiri Sukabumi Indah.....	76
14. Mekanisme Operasional SPPG Program MBG.....	81
15. Prosedur Penerimaan Bahan Makanan.....	83
16. Prosedur Persiapan Bahan Makanan	83
17. Prosedur Pengolahan Bahan Makanan	83
18. Prosedur Pemorsian Makanan	83
19. Prosedur Penyimpanan Bahan Makanan Basah	84
20. Prosedur Personal Higiene	84
21. Prosedur Pembatasan Akses Area SPPG.....	84

22. Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Pengawas dan Pelaksana Program MBG di SMPN 31 Bandar Lampung	86
23. Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program MBG	93
24. Poster Harian Menu MBG	95
25. Tempat Penyortiran Bahan Makan	97
26. Tempat Penyimpanan Bahan Makanan Basah	97
27. Tempat Penyimpanan Bahan Makanan Kering	97
28. Tempat Memasak Nasi	97
29. Tempat Pengolahan Bahan Makanan	97
30. Tempat Pengemasan Makanan	97
31. Tempat Pemorsian Makanan	98
32. Tempat Pencucian Ompreng	98
33. Fasilitas Mobil Distribusi Ompreng MBG	98
34. Alur Koordinasi BGN Lintas Sektor	106
35. Tampilan Website Dialur	106
36. Alur Komunikasi dan Koordinasi SPPG di Kecamatan Sukabumi	108
37. Monitoring SPPG Sukabumi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	108

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah gizi pada anak usia sekolah tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik mereka, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan pola makan yang tidak seimbang. Berdasarkan laporan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), ketersediaan akses yang memadai terhadap makanan berkontribusi pada terpenuhinya kebutuhan gizi anak balita, sehingga mereka dapat mencapai kondisi gizi yang membaik (Mumtaza, 2024). Penelitian Byker *et al* (2014) menunjukkan bahwa sisa sayuran merupakan sisa makanan terbanyak dibandingkan dengan jenis makanan lain pada program makan di sekolah (Diana dkk, 2025). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sebanyak 96,7% masyarakat Indonesia berusia lebih dari 5 tahun kurang mengonsumsi buah dan sayur yang menunjukkan bahwa penduduk tidak mengonsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi perhari selama 7 hari sesuai standar Kementerian Kesehatan RI (badankebijakan.kemendes.go.id, 2025). Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk merespon masalah ini dengan solusi inovatif dalam bentuk suatu program ketahanan pangan.

Di seluruh dunia, inisiatif makanan sekolah tanpa biaya telah terbukti menjadi sarana yang efisien untuk melawan kekurangan gizi, meningkatkan kehadiran di sekolah, serta mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi. Implementasi program serupa di Brasil berhasil menurunkan angka stunting dari 19,5% pada tahun 2000 menjadi 7% pada tahun 2019. Sementara, pelaksanaan program serupa di Sidama (Ethiopia) dapat menurunkan rerata absensi dari 9,3 hari menjadi 4 hari per tahun, serta menurunkan resiko putus sekolah hingga enam kali lipat bagi siswa (PMT-

AS), yang dilaksanakan pada tahun 2010, menunjukkan hasil yang positif. Hasil riset ini mengindikasikan adanya penurunan kasus malnutrisi, peningkatan status gizi anak-anak, serta kontribusi program dalam mengurangi angka stunting (Kholida dkk, 2013). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerima program (Khonsa dkk, 2025). Di Indonesia, studi mengenai inisiatif yang sebanding, yaitu Program Nutrisi Tambahan untuk Anak Sekolah pelaksanaan program makan gratis di sekolah mampu memberikan dampak baik, sehingga penting melihat pelaksanaan program MBG di Indonesia untuk melihat dampak dan keberhasilan program.

Salah satu kebijakan dan program pemerintah untuk memberikan makanan sehat secara gratis kepada masyarakat adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini sejalan dengan target nutrisi global tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO) dan UNICEF yang ditujukan untuk mengurangi persoalan gizi yang masih menjadi kendala besar dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia. Misi dari program MBG adalah untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama yang kedua, yang berfokus menghapuskan kelaparan, memperkuat ketahanan pangan dan gizi, serta mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan (Basit & Ramadani, 2025). Kebijakan MBG telah ini masuk dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan strategi nasional percepatan penurunan stunting untuk tercapainya Human Capital Index (HCI) sebesar 0,73% dalam mendukung Indonesia Emas 2045 (Santoso dkk, 2025).

Pemerintah Indonesia meluncurkan program MBG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Peraturan Presiden ini mengatur tiga hal utama yang terdapat pada pasal 3 (a). Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; (b) pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan (c) pendanaan dan pengadaan barang/jasa. Adapun ketentuan tentang tujuan dan sasaran program MBG tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang

menyatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki gizi kelompok sasaran yang telah ditentukan. Dalam mendukung berjalannya program ini, Presiden membentuk badan yang kemudian disebut Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan program ini melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. BGN pada tingkat nasional, bekerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa Kementerian. Pada tingkat Daerah, koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas setempat, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, organisasi pelaksana berdasarkan tingkat kecamatan adalah SPPG, Sekolah-sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Posyandu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Koperasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 adalah satuan pelayanan yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola MBG, dan masing-masing SPPG akan melayani maksimal 3.000 peserta didik dan non peserta didik. SPPG memiliki Kepala SPPG yang selanjutnya disebut Ka. SPPG adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditugaskan sebagai koordinator pengelola SPPG oleh BGN.

Di Indonesia, program MBG adalah salah satu program andalan yang dirancang untuk mendukung terwujudnya agenda visi Indonesia emas 2045. Program MBG secara serentak diterapkan pada 6 Januari 2025 di 31 Provinsi Indonesia (Nabila dkk, 2025). MBG mencakup sekitar 82 juta orang secara kuantitatif, termasuk 44 juta anak sekolah, 30 juta balita, 4 juta santri, dan 4 juta ibu hamil. (Agustini & Mulyani, 2025). Sekitar 48.000 unit distribusi atau dapur layanan akan membantu program menjangkau 439.000 satuan pendidikan. Menurut proyeksi tahunan, diperlukan 5,6 juta ton protein hewani, 3,3 juta ton buah-buahan, dan 1,8 juta ton sayuran untuk mendukung program ini (INDEF, 2024). Tuntutan logistik yang kompleks ini menegaskan perlunya sistem distribusi nasional yang terkoordinasi, fleksibel terhadap geografis Indonesia yang beragam, dan mampu menjamin standar mutu serta keamanan pangan. Namun, pelaksanaan kebijakan berskala

nasional ini menghadapi tantangan implementasi yang kompleks. Hasil survei lapangan menunjukkan beberapa masalah teknis. Ini termasuk ketidaksesuaian menu dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), variasi menu yang rendah di antara wilayah, dan kebingungan para siswa karena tidak ada pedoman teknis yang konsisten dan sistematis (Nabila dkk., 2025).

Program MBG sendiri telah dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, dengan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah pelaksananya. Pemerintah Provinsi Lampung berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengoordinasikan implementasi program MBG di kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Lampung memulai program MBG pada 6 Januari 2025 dengan empat titik tersebar di tiga Kabupaten di Provinsi Lampung. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Blambangan Umpu. Provinsi Lampung menjadi Provinsi dengan penerima manfaat tertinggi se-Indonesia, dengan menjangkau sekitar 2,7 juta penerima manfaat di 15 kabupaten/kota (kupastuntas.co, 2026). Selain itu, berdasarkan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dari sisi jumlah dapur operasional, Lampung menduduki posisi keempat terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Capaian tersebut menunjukkan besarnya skala implementasi MBG di Provinsi Lampung, yang sekaligus menuntut pengelolaan dan pengawasan program yang optimal agar kualitas pelaksanaannya tetap terjaga.



Gambar 1. 10 Provinsi Teratas Operasional SPPG di Indonesia
Sumber: Instagram Kemenkoptmri 2026

Pelaksanaan Program MBG di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan dinamika yang beragam. Salah satu wilayah yang mengalami keterlambatan pelaksanaan adalah Kota Bandar Lampung, yang disebabkan oleh ketidaksiapan dapur umum serta peralatan logistik (lampung.idntimes.com, 2025). Program MBG di Kota Bandar Lampung sendiri resmi dilaksanakan pada 7 Juli 2025 dalam upaya meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak sekolah (portalnasional.com, 2025). Prelevansi stunting di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 berada pada kisaran 13%, angka tersebut masih jauh dari Kota Metro yang hanya 7,1% menunjukkan bahwa program MBG menjadi intervensi krusial (lampungone.co, 2025). Sebaran program MBG di Kota Bandar Lampung terdiri dari beberapa dapur penyedia makanan (SPPG) tingkat kecamatan yang mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah tidak selalu berjalan seragam, karena setiap wilayah memiliki kondisi dan tantangan tersendiri. Tetapi, implementasi Program MBG di Kota Bandar Lampung dalam berbagai kecamatan menghadapi berbagai tantangan, seperti keracunan di beberapa sekolah, tata kelola yang kurang optimal, lemahnya pengawasan, dan belum adanya regulasi yang mendukung sanksi bagi dapur MBG yang lalai (kupastuntas.co, 2025). Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengelolaan dan pengendalian mutu pelaksanaan program di tingkat lokal. Kondisi ini memicu munculnya persoalan awal dalam implementasi kebijakan MBG di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Persebaran Kasus Keracunan Program MBG di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	Jumlah Kasus
1.	Bandar Lampung	530 Korban
2.	Lampung Timur	82 Korban
3.	Lampung Utara	67 Korban
4.	Tanggamus	18 Korban
5.	Metro	12 Korban
6.	Tulang Bawang Barat	7 Korban
Total Kasus Provinsi Lampung		716 Korban

Sumber: LBH Provinsi Lampung dalam lampung.nu.or.id 2025

Data BGN pada 22 September 2025 juga mencatat sebanyak 4.711 orang mengalami keracunan dari tujuh wilayah di Indonesia dan dari jumlah tersebut, Kota Bandar Lampung menempati posisi teratas dengan 530 orang terdampak (kupastuntas.co, 2025). Berdasarkan tabel 1 kasus keracunan di Bandar Lampung akibat program MBG juga turut menjadi kasus keracunan terbanyak di seluruh Provinsi Lampung. Kecamatan Sukabumi menjadi salah satu Kecamatan tempat operasional SPPG Kota Bandar Lampung yang turut menghadirkan masalah dalam pelaksanaannya. Temuan awal yaitu sebanyak 247 siswa/i di Kecamatan Sukabumi mengalami keracunan akibat makanan tercemar bakteri *Escherichia Coli* yang diduga berasal dari air atau peralatan yang tidak higienis sehingga mengakibatkan penutupan dapur sementara (liputan6.com, 2025). Kepala Dinas Kesehatan juga mencatat hampir seluruh SPPG di Bandar Lampung belum memiliki sertifikat Laik Higieni Sanitas (LHS) (berdikari.co, 2025). Kejadian ini memicu kritik dari masyarakat dan organisasi seperti Lembaga Hukum Kota Bandar Lampung (LBH), yang menunjukkan bahwa operasional SPPG masih menghadapi kelemahan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan higienitas, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas serta keamanan makanan yang disajikan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung, khususnya pada SPPG Kecamatan Sukabumi, masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan. Kasus keracunan yang dialami siswa/i menjadi bukti adanya kendala dalam penerapan standar kebersihan, pengelolaan dapur, serta prosedur penyajian makanan yang seharusnya menjamin keamanan pangan bagi peserta didik. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program di lapangan belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memastikan kesesuaian antara pedoman pelaksanaan dan praktik operasional yang terjadi di sekolah-sekolah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febryanti dkk (2025) menelaah implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang dan menemukan bahwa program tersebut mampu meningkatkan partisipasi serta antusiasme siswa dalam kegiatan belajar, meskipun

masih menghadapi keterbatasan pada aspek regulasi, pengawasan, dan efisiensi pengelolaan anggaran sekolah. Penelitian Riyanto dan Sinaga (2025) mengkaji program MBG dari perspektif hukum dan hak anak atas makanan aman dan sehat, serta menyoroti lemahnya pengawasan dan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pangan pada pelaksanaan program tersebut, terutama setelah terjadinya kasus keracunan massal yang menunjukkan masih rendahnya akuntabilitas pelaksana di tingkat daerah. Sementara itu, Penelitian Sari (2025) menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di Kabupaten Bondowoso telah berjalan relatif efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa dan pemenuhan gizi, namun masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan kapasitas transportasi, variabilitas menu akibat keterbatasan anggaran, serta lemahnya pengawasan di tingkat sekolah sehingga diperlukan penguatan tata kelola, optimalisasi sumber daya, dan perbaikan mekanisme distribusi agar program dapat berkelanjutan dan tepat sasaran. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah menelaah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari aspek efektivitas, tanggung jawab hukum, maupun kesiapan pemerintah daerah, namun sebagian besar masih terbatas pada analisis di tingkat sekolah atau pemerintah daerah secara umum tanpa meninjau implementasi langsung di SPPG tingkat kecamatan sebagai pelaksana teknis kebijakan.

Belum banyak kajian yang menyoroti secara mendalam pelaksanaan program MBG dari sisi permasalahan di lapangan, khususnya kasus keracunan yang mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan, penetapan standar kebersihan, dan prosedur operasional pada penyelenggaraan program di wilayah kecamatan yang memiliki kompleksitas tinggi. Sehingga, studi ini memiliki signifikansi dalam mengatasi kekurangan informasi dengan menyelidiki pelaksanaan program MBG di kawasan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Kawasan ini merupakan salah satu tempat dengan kasus keracunan yang paling sering terjadi di Indonesia, dengan total 530 kasus, di mana 247 di antaranya berasal dari daerah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan empiris yang mendalam tentang efektivitas kebijakan ini dan seberapa baik lembaga pengelola dapat memastikan keamanan serta kelangsungan program MBG.

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) berfungsi sebagai dasar analisis. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik badan pelaksana, sikap atau disposisi pelaksana, serta konteks sosial, ekonomi, dan politik merupakan enam variabel utama yang menentukan seberapa baik suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan pada seberapa baik mereka yang bertanggung jawab memahami tujuan kebijakan, yang diperkuat oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, koordinasi yang efisien antara badan pelaksana, dan sikap positif terhadap penerapan program dalam lingkungan yang mendukung. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat menilai sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan variabel-variabel tersebut. Pendekatan ini penting untuk memahami dinamika implementasi kebijakan, mengingat masih adanya permasalahan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta rendahnya pengawasan di lapangan yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program. Dengan demikian, penerapan teori Van Meter dan Van Horn (1975) diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang semakin sistematis terkait faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan penelitian berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung).”** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran empiris mengenai implementasi MBG dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan program dalam mendukung perbaikan gizi anak serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG di Kecamatan Sukabumi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG di Kecamatan Sukabumi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan. Melalui analisis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang pengaruh faktor-faktor implementasi terhadap efektivitas kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, hasilnya juga dapat memperluas pemahaman serta literatur kebijakan sosial di Indonesia dengan menampilkan keterkaitan antara teori dan praktik pelaksanaan kebijakan di daerah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Pelaksana program (SPGG), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi SPPG dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG. Penelitian ini juga memberikan masukan

bagi SPPG untuk mengoptimalkan koordinasi, menyesuaikan prosedur kerja, dan mengatasi hambatan lingkungan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih aman, efektif, dan sesuai tujuan.

- 2) Penerima program, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi siswa/i penerima program MBG di Kecamatan Sukabumi melalui hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan ketepatan menu makanan bagi siswa/i.
- 3) Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana latihan dalam penulisan karya ilmiah serta melatih peneliti dalam mengungkap dan menganalisis permasalahan secara sistematis dengan metode ilmiah yang baik. Penelitian ini disusun pula sebagai bentuk pemenuhan karya akhir yang menjadi salah satu ketentuan akademik untuk menyelesaikan program studi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian, Penulis, dan Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang). (Febryanti dkk., 2025)	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG di SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang sudah berjalan sejak awal 2025. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program MBG mampu meningkatkan partisipasi serta antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Faktor pendukung penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dan satuan pendidikan, sedangkan factor penghambat penelitian ini adalah keterbatasan anggaran dan tata kelola sekolah yang belum optimal. Secara keseluruhan, implementasi program MBG sudah berjalan cukup efektif, tetapi masih lemah dalam aspek regulasi, pengawasan, dan kesinambungan anggaran.	Persamaan: Mengkaji implementasi kebijakan program MBG, fokus analisis efektivitas implementasi, koordinasi antar lembaga, serta hambatan tata kelola dan pendanaan. Perbedaan: Penelitian sebelumnya fokus pada pelaksanaan di tingkat sekolah, sedangkan penulis fokus pada tingkat kecamatan yang mencakup peran SPPG sebagai organisasi pelaksana. Dimensi lebih luas yaitu peneliti membahas isu distribusi makanan dan kejadian keracunan yang tidak dibahas penelitian sebelumnya.

Judul Penelitian, Penulis, dan Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
Penegakkan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara. (Sumantri Riyanto dkk., 2025)	Kualitatif studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki insiden keracunan yang berarti adanya lemah pengawasan mutu pangan, keterbatasan sumber daya, rendahnya pelatihan pelaksana, serta tidak adanya regulasi turunan yang memastikan kewanamanan makanan di seluruh rantai pasok. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi sistemik dalam pelaksanaan program MBG	Persamaan: Menyoroti permasalahan keamanan pangan dan lemahnya koordinasi program MBG, berfokus pada perlindungan hak anak dan kegagalan negara/daerah dalam memastikan pelaksanaan program yang aman. Perbedaan: Penelitian sebelumnya biasanya mengkaji subjek ini dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Tetapi, kerangka kerja implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, yang berfokus pada pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur dan teknik manajerial yang digunakan selama implementasi kebijakan, menjadi dasar penelitian ini. Sementara penelitian sebelumnya mengedepankan kewajiban dan tanggung jawab hukum negara, penelitian ini lebih menyoroti efektivitas pelaksanaan dan berbagai hambatan yang mungkin muncul.
Implementasi Kebijakan Makan Bergizi di Kabupaten Bondowoso. (Sari., 2025)	Kualitatif deskriptif	Pelaksanaan kebijakan MBG di SDIT KIC Bondowoso secara umum berjalan secara efektif, meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan struktural. Pada sisi implementasi program ini telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun kendala logistik dan keterbatasan sumber daya manusia tetap menjadi	Persamaan: Menganalisis proses implementasi program serupa dengan memperhatikan kendala dalam tata kelola dan kebutuhan program, serta melakukan analisis terhadap badan pelaksana SPPG. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan tingkat sekolah dan

masalah yang signifikan.	menggunakan analisis teori implementasi kebijakan Edward, sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn.
--------------------------	--

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2025

Tabel penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi merupakan proses yang penting untuk dianalisis agar program berjalan sesuai tujuan. Penelitian Febryanti dkk. (2025) menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG sudah memberikan manfaat, tetapi belum adanya regulasi dasar operasional, keterbatasan anggaran, serta tata kelola satuan pendidikan yang belum optimal menyebabkan gangguan kegiatan belajar mengajar. Penelitian Sumantri Riyanto dkk. (2025) menggunakan pendekatan yuridis normatif yang kuat dalam aspek hukum dan tanggung jawab negara, tetapi belum menyentuh dimensi empiris mengenai bagaimana pelaksanaan program dijalankan di lapangan. Sementara penelitian Sari (2025) menekankan pada proses implementasi dengan menilai dari tahap perencanaan hingga pemantauan. Ketiga penelitian tersebut belum ada yang berangkat dari kasus keracunan dan menilai implementasi secara langsung dari organisasi pelaksana (SPPG) dan penerima manfaat yaitu sekolah-sekolah, serta belum ada penelitian pelaksanaan MBG di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan program MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian ini diarahkan pada proses implementasi pihak pelaksana yaitu SPPG sebagai dapur umum penyedia dan penentuan makanan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan program MBG di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG di Indonesia telah banyak dikaji dari sisi penerima program dan kelemahan regulasinya. Kajian tersebut memberikan pemahaman mengenai aspek penerima, kelemahan regulasi, dan lainnya pengawasan, tetapi aspek dalam sisi kelalaian pelaksana program masih belum diulas secara mendalam untuk melihat

kelemahan aspek-aspek pemahaman dan faktor-faktor hambatan dan pendukung, sehingga terjadi kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah Kecamatan Sukabumi.

2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik

Sesuai dengan pernyataan Thomas R. Dye (1992), kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah tentang apakah akan melaksanakan suatu tindakan atau sebaliknya tidak melakukannya. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik pada dasarnya ditentukan oleh pemerintah dan berkaitan erat dengan berbagai opsi yang harus ditimbang atau ditolak oleh pihak pemerintah. Sementara itu, Pressman dan Wildavsky dalam Meutia (2017:3), kebijakan publik merupakan hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak hanya dipahami sebagai keputusan yang telah ditetapkan, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan faktor yang dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian usaha yang menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha untuk menyelesaikan persoalan sosial, dengan memperhatikan keberhasilan dan rintangan yang muncul sepanjang perjalanan tersebut.

Menurut Tahir (2019) kebijakan publik terdiri dari beberapa elemen, yang mencakup sasaran yang ingin diraih, definisi khusus untuk mencapai sasaran tersebut, langkah yang berwenang untuk mencapai sasaran, kegiatan untuk menetapkan sasaran, menyusun rencana, melaksanakan serta menilai program, dan dampak dari program yang diterapkan. Sebagaimana William Dunn dalam Subarsono (2005) menggambarkan pengembangan kebijakan publik sebagai serangkaian tahapan penting. Tahap-tahap ini meliputi penetapan agenda, penyusunan kebijakan, penetapannya, implementasinya, dan akhirnya penilaian dampaknya. Setiap fase memainkan peran tersendiri dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan publik dan dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik. Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai kumpulan keputusan dan serangkaian langkah yang dirumuskan

pemerintah untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini melewati beberapa tahapan, mulai dari pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hingga penilaiannya. Selain itu, pilihan pemerintah terkait implementasi atau penundaan suatu program sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah sosial tercermin dalam kebijakan publik.

2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Pengertian dasar implementasi kebijakan dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya dipahami sebagai rangkaian langkah yang dilakukan oleh orang atau pejabat, baik dari lembaga publik maupun swasta, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam ketetapan kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn lebih diarahkan pada pemahaman lokasi dan titik di mana kebijakan dijalankan. Dalam analisa kebijakan Dye dan Jones (Dye dan Jones, 1971) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Pengertian implementasi kebijakan Dye dan Jones (1971) lebih menekankan bahwa implementasi dipahami sebagai proses operasional yang dijalankan oleh agen-agen eksekutif yang terorganisir untuk menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata, sehingga menekankan bagaimana aparat pelaksana menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari sudut pandang masalah kebijakan, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edwards III (1984), pelaksanaan kebijakan sangat penting dari sudut pandang politik karena isu-isu politik harus diselesaikan (Said dkk., 2021). Thomas B. Smith berpendapat bahwa semua kebijakan harus dilaksanakan agar hasilnya benar-benar menyerupai atau bahkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh para politisi (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Secara visual, setiap tindakan memiliki tujuan yang jelas, yaitu menentukan hasil yang diinginkan. Tujuan ini kemudian diimplementasikan melalui program aksi dan

proyek-proyek spesifik, yang dijalankan dengan tekun dan penuh pemahaman. Implementasi program ini mengikuti rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada akhirnya, implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh situasi dan konteks pelaksanaannya. Berdasarkan Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Sari (2025) implementasi yang sukses sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar operasional dan keselarasan antara desain kebijakan dan kondisi di lapangan. Capaian program dibandingkan dengan tujuan kebijakan untuk menilai keseluruhan proses implementasi kebijakan. Capaian program dievaluasi berdasarkan bagaimana capaian tersebut memengaruhi capaian yang diharapkan bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan (Besar, 2010).

Secara umum, proses mengubah keputusan politik menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat dipandang sebagai implementasi inisiatif kebijakan. Lembaga pemerintah bukan satu-satunya yang terdampak oleh proses ini sektor swasta juga dapat terlibat, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Implementasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terencana, mulai dari penyusunan program, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan. Secara sederhana, implementasi kebijakan merupakan tahap di mana ide atau keputusan kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan tindakan konkret. Lingkungan perancangan dan implementasi suatu kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilannya. Sehingga, implementasi kebijakan mencakup lebih dari sekadar menjalankan arahan administratif; implementasi kebijakan juga mencakup memastikan bahwa hasilnya secara akurat mencerminkan tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan (Besar, 2010).

2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan

Ciri-ciri proses pembentukan kebijakan dan tahapan implementasi kebijakan berbeda. Proses ini biasanya mengikuti logika bottom-up di sepanjang fase pembentukan kebijakan, di mana kebutuhan, keinginan, atau dukungan masyarakat menjadi dasar kebijakan tersebut. Berdasarkan Wibawa (1994) dalam Feis (2009:66) logika *top-down* digunakan selama fase implementasi, yang berarti bahwa kebijakan makro ekonomi atau umum diubah menjadi tindakan lokal yang

spesifik dan konkret agar dapat dioperasionalkan. Terdapat berbagai model implementasi kebijakan/program, diantaranya adalah model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle (1980), dan Jones (1983).

1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)

Sebuah Model Implementasi Kebijakan (1975) adalah nama metodologi implementasi kebijakan yang diciptakan oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor publik dan swasta dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan politik. Metode ini berupaya menyediakan model konseptual yang menghubungkan kebijakan publik dengan kinerja atau pencapaiannya, serta menghubungkan isu kebijakan publik dengan pelaksanaannya. Proses implementasi ini merupakan salah satu contoh model dengan pendekatan *top-down*. Intinya, proses implementasi ini merupakan upaya yang disengaja untuk mencapai efisiensi implementasi kebijakan yang tinggi, yang dicapai melalui interaksi berbagai variabel. Proses ini merupakan abstraksi atau pelaksanaan implementasi kebijakan. Model ini berasumsi bahwa keputusan politik, implementasi kebijakan, dan efisiensi kebijakan publik semuanya mengikuti jalur linier. Menurut konsep ini, sejumlah faktor yang saling terkait memengaruhi efektivitas kebijakan, khususnya:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Sulaeman (1998) menjelaskan bahwa ketika menilai pelaksanaan tindakan kebijakan, para pembuat kebijakan menginginkan tolak ukur yang tepat dalam bentuk kriteria dan tujuan. Dengan kata lain, sejauh mana kriteria dan tujuan yang ditetapkan dapat dipenuhi melalui penerapannya yang pada dasarnya tercermin dalam keberhasilan langkah-langkah kebijakan (Al Farisi, 2023). Kebijakan yang berhasil dapat hancur jika orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya tidak memahami tujuan dan kriterianya dengan baik. Implementasi yang tidak efektif sering kali disebabkan oleh individu yang bertanggung jawab yang menolak kebijakan, salah menafsirkannya, atau bahkan salah menafsirkan tujuan dan arahnya.

b. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa menekankan sumber daya kebijakan sama pentingnya dengan komunikasi (Sugiannor, 2022). Dari sudut pandang administratif, ketersediaan sumber daya ini sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan yang efisien. Sumber daya ini mengacu pada ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Di sisi lain, kurangnya insentif atau pendanaan seringkali menjadi penyebab utama kegagalan pelaksanaan program.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi resmi dan informal yang terlibat langsung dalam proses implementasi merupakan fokus implementasi kebijakan. Elemen ini krusial karena sejauh mana karakteristik dan kemampuan badan pelaksana sesuai dengan tuntutan kebijakan itu sendiri sangat memengaruhi seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam beberapa situasi, kebijakan membutuhkan badan pelaksana yang sangat disiplin dan berdedikasi tinggi untuk menjamin hasil terbaik. Kementerian, lembaga, dan organisasi lain yang terkait dengan kebijakan yang sedang diimplementasikan dapat diikutsertakan dalam badan pelaksana ini.

d. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

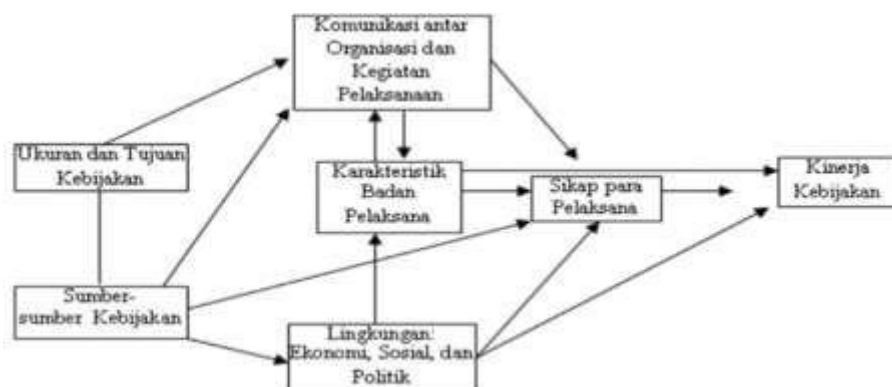
Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Widodo (2007), tingkat pemahaman menyeluruh individu yang melaksanakan kebijakan terhadap kriteria dan tujuannya sangat penting bagi efektivitasnya. Untuk mencegah kesalahpahaman selama implementasi, informasi mengenai kriteria dan tujuan kebijakan harus disajikan secara jelas dan lengkap karena mereka terlibat langsung dalam pencapaian tujuan tersebut. Koordinasi merupakan elemen penting yang memfasilitasi kelancaran prosedur implementasi dalam situasi ini. Kesalahan selama implementasi kebijakan lebih kecil kemungkinannya terjadi jika terdapat koordinasi dan komunikasi yang lebih baik di antara para peserta.

e. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006) dijelaskan bahwa sikap para pengambil keputusan politik, baik positif maupun negatif, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan yang diterapkan seringkali tidak didasarkan pada pertimbangan warga setempat, yang sangat memahami permasalahan yang mereka hadapi. Kebijakan yang bersifat top-down seringkali dibuat oleh para pengambil keputusan tingkat tinggi yang mungkin tidak sepenuhnya memahami apalagi mampu mengatasi kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Sejauh mana unsur-unsur lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik merupakan komponen terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan. Implementasi tindakan kebijakan seringkali terhambat oleh situasi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak stabil atau merugikan. Situasi yang merugikan ini dapat mengakibatkan sejumlah masalah yang menghambat efektivitas implementasi. Gambar berikut memberikan representasi skematis model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (1975).



Gambar 2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)

Sumber: Winarno (2007:157)

2. Model Implementasi Grindle (1980)

Dengan menggunakan model "Implementasi sebagai Proses Politik dan Administratif, Merilee S. Grindle (1980) menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan melibatkan sejumlah aktor atau kelompok kepentingan yang membuat keputusan. Baik substansi program maupun dinamika interaksi para pengambil keputusan dapat memengaruhi hasil akhir proses tersebut. Grindle menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi seberapa baik kebijakan pemerintah diimplementasikan:

- 1) Hasil yang diperoleh (*outcome*), atau sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai, dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik. Menurut Grindle, ada dua kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan, yakni:
 - a. Dari sudut pandang proses, tingkat kesesuaian langkah-langkah yang diterapkan dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan tingkat implementasi kebijakan sesuai dengan rancangan awalnya dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi.
 - b. Evaluasi berfokus pada apakah tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai dari sudut pandang hasil. Biasanya, dua kriteria utama digunakan untuk mengukur dimensi ini, yaitu:
 - a) Pengaruh atau konsekuensi yang ditimbulkan terhadap masyarakat, baik pada tingkat individu maupun kelompok.
 - b) Derajat perubahan yang muncul serta sejauh mana kelompok sasaran menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.
- 2) Menurut Grindle, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik juga sangat dipengaruhi oleh tingkat *implementability* atau sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Tingkat *implementability* ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain:
 - a. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)
Mencakup:
 - a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi *Interest affected* (*Interest affected*)

Berbagai kepentingan yang memengaruhi implementasi kebijakan disebut sebagai konflik kepentingan. Indikator ini menyoroti fakta bahwa berbagai pihak, masing-masing dengan kepentingannya sendiri, mau tidak mau terlibat dalam implementasi kebijakan apa pun. Dengan demikian, penting untuk memahami seberapa besar kepentingan-kepentingan ini memengaruhi implementasi kebijakan dan hasil yang diharapkan.

b) Tipe manfaat (*Type of benefits*)

Tujuan konten kebijakan dalam konteks ini adalah untuk memperjelas bahwa setiap kebijakan harus mencakup serangkaian manfaat yang menunjukkan manfaat penerapannya. Dengan kata lain, konten kebijakan harus menunjukkan seberapa besar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang nyata dan menguntungkan bagi populasi sasaran yang dituju.

c) Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*)

Pada dasarnya, setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu yang harus dipenuhi. Poin ini menekankan bahwa untuk mengukur dan menilai arah implementasi suatu kebijakan, perubahan yang diantisipasi sebagai hasil implementasinya harus memiliki kriteria atau besaran yang terdefinisi dengan baik.

d) Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*)

Efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dalam proses implementasi kebijakan harus dijelaskan secara eksplisit di bagian ini. Menilai apakah program atau kebijakan yang akan diimplementasikan telah diposisikan secara efektif terkait kebutuhan, tujuan, dan konteks sangatlah penting.

e) Pelaksana program (*Program implementer*)

Tanpa bantuan pelaksana kebijakan yang kompeten, suatu program atau kebijakan tidak dapat diimplementasikan seefektif mungkin. Sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen kebijakan secara lengkap dan tepat merinci siapa yang bertindak sebagai pelaksana. Menilai kesiapan, akuntabilitas, dan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal membutuhkan kejelasan mengenai pelaksana kebijakan.

f) Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources committed*)

Suatu program hanya dapat dijalankan dengan sukses jika didukung oleh sumber daya yang memadai. Untuk menjamin implementasi kebijakan mencapai tujuannya, dukungan sumber daya baik berupa dana, sumber daya manusia, maupun fasilitas sangatlah penting.

b. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Mencakup:

a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, interest, and strategy of actor involved*)

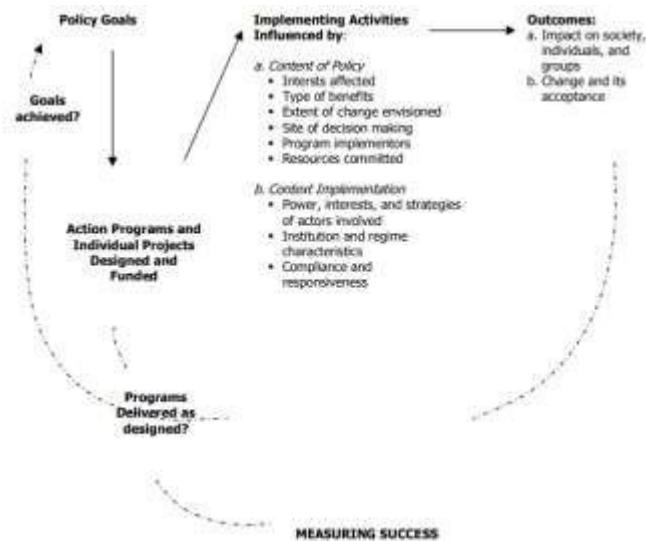
Rencana, kepentingan, dan kekuatan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus dipertimbangkan agar prosesnya berhasil. Ada kemungkinan strategi tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan jika aspek-aspek ini tidak direncanakan dan dipertimbangkan dengan cermat.

b) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and regime characteristic*)

Kinerja suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, bagian ini menguraikan sejumlah karakteristik organisasi yang penting bagi efektivitas proses implementasi kebijakan.

c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari (*Compliance and responsiveness*)

Tingkat kepatuhan dan reaksi individu yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan ini merupakan komponen krusial lain dalam pelaksanaannya. Poin ini memperjelas seberapa jauh penanggung jawab melaksanakan kebijakan sesuai rencana dan bagaimana tindakan mereka dipengaruhi oleh konteks dan isi kebijakan. Hal ini menunjukkan apakah pelaksanaannya sejalan dengan tujuan dan seberapa besar lingkungan memengaruhi hasil atau modifikasinya.



Gambar 3. Model Implementasi Grindle (1980)

Sumber: Merilee S. Grindle. 1980 dikutip dari Imronah (2009:72).

3. Model Implementasi Jones (1984)

Berdasarkan Jones (1984) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan program melalui tiga tindakan utama yang saling terkait (Tahir, 2019). Jones (1984) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan program melalui tiga tindakan utama yang saling terkait. Ketiga kegiatan ini krusial karena memiliki kekuatan untuk memengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan (Tahir, 2019): Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

a. Organisasi

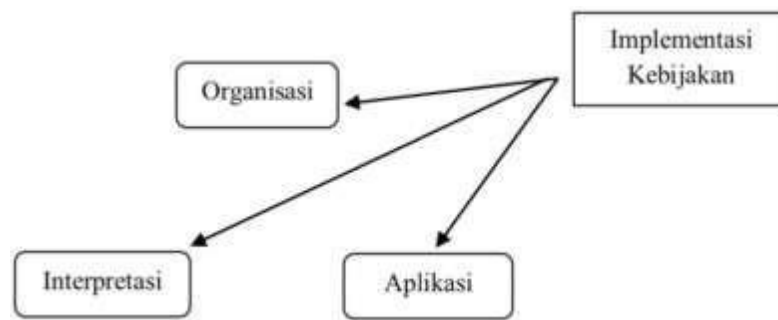
Organisasi di sini dimaksudkan sebagai pembentukan atau penataan kembali metode, sumber daya, serta unit-unit untuk menunjang agar program berjalan.

b. Interpretasi

Interpretasi adalah proses mengubah program menjadi rencana yang lugas, berorientasi pada tujuan, dan mudah dikelola.

c. Aplikasi (penerapan)

Penerapan menggambarkan bagaimana tugas-tugas rutin seperti pengiriman barang dan jasa dilakukan.



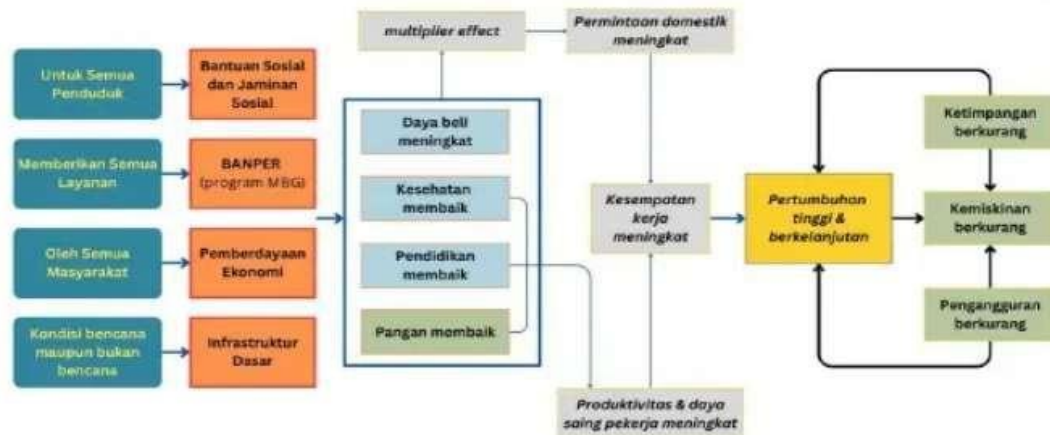
Gambar 4. Model Implementasi Jones (1984)

Sumber: Tahir (2019)

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis, karena model ini memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh enam variabel penting, yakni kejelasan standar dan sasaran kebijakan, kecukupan sumber daya, efektivitas komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

2.4 Tinjauan tentang Program Makan Bergizi Gratis

Satu di antara program prioritas yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasan di balik peraturan ini adalah kesadaran bahwa 41% siswa Indonesia sering kelaparan di kelas, yang mengganggu fokus dan prestasi akademik mereka. Penanggulangan masalah gizi dan peningkatan sumber daya manusia, terutama anak-anak dan ibu hamil, merupakan tujuan dari inisiatif ini. Tahap awal pelaksanaan program direncanakan mulai pada 2 Januari 2025, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 (Merlinda & Yusuf, 2025).



Gambar 5. Kerangka Pikir Program

Sumber: Bappenas dan Unicef (dilengkapi dengan BANPER dan program MBG)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Pangan Nasional, yang juga dikenal sebagai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan sebagai langkah struktural. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden dan bertugas melaksanakan tugas-tugas nasional di bidang pangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1). Program ini antara lain didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Langkah Strategis di Bidang Pangan dan Gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menurut Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan (BPNHN) (bphn.go.id, 2025).

Di Kota Bandar Lampung, pelaksanaan program MBG telah dilaksanakan secara bertahap di berbagai kecamatan salah satunya merupakan Kecamatan Sukabumi. Pelaksanaan program MBG di Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui SPPG yang ditargetkan mampu melayani 3.000 porsi makanan bergizi setiap harinya. Mereka adalah orang-orang yang secara langsung berperan dalam kegiatan memasak makanan untuk siswa sekolah. SPPG bertindak sebagai dapur utama MBG yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan hingga pengiriman kepada para siswa. Peran staf

dapur memiliki arti penting, karena dari merekalah mutu hidangan ditentukan. Oleh karena itu, kesuksesan MBG di lapangan sangat tergantung pada kekompakan tim SPPG, terutama para koki (suara.com, 2025).

Memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi nasional secara memadai merupakan tanggung jawab utama Badan Ketahanan Pangan Nasional (BGN). BGN menjalankan tujuh fungsi fundamental yang saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan dan pengembangan pedoman teknis untuk sistem pangan nasional dan administrasinya, yang mencakup pasokan, distribusi, promosi, dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, dikenal sebagai koordinasi kebijakan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, yaitu melaksanakan kebijakan yang telah disusun, termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pangan di seluruh Indonesia.
3. Agar dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien, departemen-departemen Badan Pangan Nasional harus mengoordinasikan dukungan administratif dan pelaksanaan tugasnya, yang dikenal sebagai koordinasi internal.
4. Manajemen aset negara, yang mencakup pengawasan pengelolaan semua aset negara di bawah lingkup Otoritas Pangan Nasional dan memastikan penggunaannya mematuhi hukum dan pedoman yang relevan.
5. Dukungan substantif, yang mengacu pada pemberian bantuan dan dukungan yang signifikan kepada semua unit Badan Pangan Nasional sehingga setiap departemen mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
6. Pemantauan, yaitu mengawasi dan mengelola pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk memastikan setiap program terlaksana sesuai dengan rencana dan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Disamping itu, komite juga mengerjakan proyek-proyek tambahan yang ditugaskan langsung oleh presiden bila diperlukan.

Menyusul dengan peraturan tersebut, Presiden kembali mengesahkan peraturan MBG melalui Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG yang terdiri dari 6 bab, yaitu

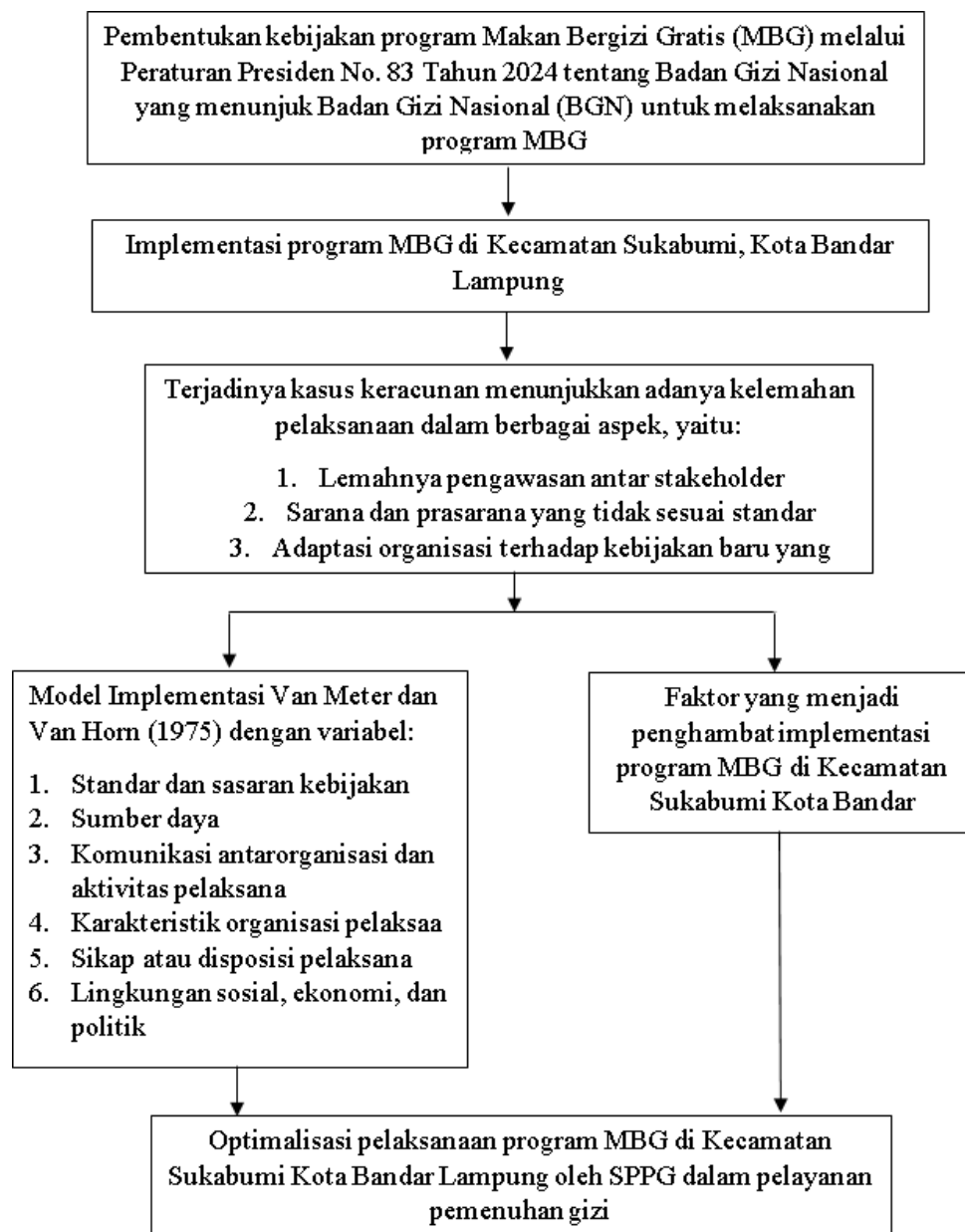
1. Ketentuan umum
2. Penyelenggaraan program MBG
3. Pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
4. Pendanaan dan pengadaan barang/jasa
5. Ketentuan lain-lain
6. Ketentuan penutup

Peraturan ini dibentuk karena belum adanya peraturan yang menjelaskan tata kelola dan penyelenggaraannya, sehingga pada tahap awal pelaksanaan banyak sekali masalah dan kendala yang terjadi mengakibatkan protes dari masyarakat. Peraturan ini menjadi landasan bagi pihak pelaksana terutama SPPG dalam melaksanakan dan mendistribusikan program MBG.

2.5 Kerangka Berpikir Penelitian

Peneliti menyusun kerangka konseptual secara logis sebagai dasar pemikiran yang bertujuan untuk memperkuat latar belakang, fokus, dan arah penelitian. Kerangka ini dirancang agar proses penelitian berjalan secara metodis, runtut, dan mudah dipahami, serta memastikan bahwa setiap langkah analisis didasarkan pada logika yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2017:92). Dalam kerangka ini, teori yang digunakan tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang relevan sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang diteliti, bagaimana hubungan antar unsur dibangun, dan mengapa penelitian dilakukan dengan pendekatan tersebut. Penyusunan kerangka konseptual juga membantu peneliti menjaga konsistensi antara rumusan masalah, tujuan, teori, metode, dan hasil penelitian, sehingga analisis yang dilakukan tetap fokus dan tidak keluar dari jalur penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir ini, peneliti memiliki landasan teoritis yang kuat serta panduan yang jelas dalam mengembangkan argumentasi

dan menghasilkan simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut kerangka berpikir peneliti:



Gambar 6. Kerangka Berpikir
Sumber: Data diolah oleh peneliti 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan penelitian kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara holistik dan mendalam terkait bagaimana program MBG diimplementasikan. Studi kasus dipilih karena dapat membantu fokus pada konteks spesifik di SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam, memperoleh pemahaman kontekstual, dan menganalisis secara holistik tentang implementasi program MBG, berikut dengan faktor-faktor yang menghambat.

3.2 Fokus Penelitian

1. Melakukan analisis implementasi program MBG dengan menggunakan kerangka teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki enam variabel sebagai berikut:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan, yakni fokus menelaah keberhasilan implementasi yang bergantung pada kejelasan standar dan sasaran yang hendak dicapai. Standar dan sasaran kebijakan memberikan arah yang tegas sebagai pedoman bagi pelaksana di lapangan dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan dan capaian yang diharapkan dari kebijakan. Program MBG memiliki banyak sekali standar yang harus diterapkan oleh SPPG. Analisis pada aspek ini difokuskan untuk menilai sejauh mana standar pelaksanaan program MBG dirumuskan secara

jelas, serta bagaimana pemahaman dan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap standar, termasuk apakah sasaran sudah ditetapkan sesuai standar dan tepat dengan kebutuhan anak Kecamatan Sukabumi.

- b. Sumber daya, yakni salah satu unsur penting yang menentukan kelancaran proses pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, program MBG di Kecamatan Sukabumi membutuhkan banyak sekali sumber daya termasuk ketersediaan anggaran operasional, fasilitas dapur, dan lain sebagainya. Analisis ini diarahkan pada kecukupan dan ketersediaan sumber daya, baik dari segi tenaga pelaksana, anggaran, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelaksana.
- c. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, yakni fokus melihat komunikasi yang dilakukan oleh para aktor, seperti pemerintah kota, kecamatan, SPPG, pihak sekolah, dan pihak lembaga swadaya masyarakat yang turut mendukung berjalannya program. Koordinasi yang lemah antarorganisasi menimbulkan kendala seperti, keterlambatan distribusi makanan, kurangnya pengawasan mutu, dan tidak adanya tindak lanjut cepat ketika terjadi masalah seperti keracunan massal. Analisis diarahkan untuk menilai bagaimana bentuk komunikasi dan koordinasi antarinstansi berjalan, serta sejauh mana mekanisme pengawasan dan pelaporan antar pelaksana telah berjalan sesuai dengan struktur yang ditetapkan.
- d. Karakteristik organisasi pelaksana, yakni fokus melihat bagaimana struktur organisasi pelaksana program MBG melakukan pembagian tugas secara jelas, serta apakah para pelaksana memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjelaskan tugasnya. Hal ini diperlukan untuk keberhasilan dan penerapan program jangka panjang.
- e. Sikap atau disposisi pelaksana, yakni fokus menganalisis sikap, komitmen, dan integritas para pelaksana dalam menjalankan kebijakan termasuk persepsi dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam program. Disposisi pelaksana ini penting untuk melihat bagaimana komitmen dan pandangan pelaksana terhadap program MBG,

serta faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi mereka selama proses pelaksanaan kebijakan berlangsung.

- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yakni fokus melihat bagaimana lingkungan sosial yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap program, pola makan siswa, serta kebiasaan konsumsi keluarga. Lingkungan ekonomi menyangkut bagaimana program mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar dan bagaimana ekonomi mempengaruhi pelaksanaan program, sedangkan lingkungan politik mencakup dukungan atau tekanan pihak legislatif, media, maupun kelompok masyarakat terhadap berjalannya program. Aspek ini penting dianalisis untuk memahami bagaimana dinamika sosial dan politik memengaruhi keberlanjutan program, serta bagaimana respon masyarakat dapat menjadi indikator keberhasilan.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi program MBG di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan tujuan program belum dapat tercapai secara optimal. Hambatan-hambatan tersebut dapat muncul dari berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program di tingkat lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SPPG yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan difokuskan pada SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah beserta sekolah-sekolah penerima manfaat yang berada dalam wilayah pelayanannya. Sementara itu, SPPG Yayasan Insan Sehat Mandiri digunakan sebagai lokasi pendukung untuk memperoleh informasi tambahan dan melakukan triangulasi data terkait pelaksanaan program. Berdasarkan data oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 247 siswa di SMPN 31

Bandar Lampung dan SMKN 5 Bandar Lampung yang berada di Kecamatan Sukabumi terkena keracunan makanan dengan keluhan mual, muntah dan pusing (liputan6.com, 2025). Kondisi tersebut menjadikan lokasi ini relevan untuk diteliti guna memahami bagaimana pelaksanaan program dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta sejauh mana mekanisme pengawasan dan pelaksanaan standar keamanan pangan diterapkan oleh pihak pelaksana di lapangan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer

Informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber primer baik orang maupun kelompok melalui wawancara dengan informan yang menjadi sampel penelitian disebut data primer (Sarwono, 2006). Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dianalisis, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang menurut Sugiyono (2018), melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan pertimbangan tertentu. Wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ketua pengurus Dapur Pangan dan Gizi (SPGG) Kecamatan Sukabumi, kepala sekolah, guru, dan peserta program (siswa/i), digunakan untuk mengumpulkan data primer penelitian. Selain itu, data primer diperoleh pula melalui observasi terhadap fasilitas pendukung pelaksanaan program.

Tabel 3. Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Tempat/Instansi
1.	Deri Rian Sanjaya, S.H	Kepala SPPG Sukabumi Yayasan Asri Amanah Barokah dan Koordinasi Kecamatan (Korcama) Kecamatan Sukabumi.	4 Februari 2026	SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah Sukabumi 004, Bandar Lampung.
2.	Argha Pandu Mulia Naibaho, S.H., M.H	Kepala SPPG Sukabumi Indah Yayasan Insan Sehat Mandiri Kecamatan Sukabumi.	9 Februari 2026	SPPG Sukabumi Indah Yayasan Insan Sehat Mandiri, Bandar Lampung.
3.	Achmad Hery	Kepala Kantor	4 Maret	Kantor Pelayanan

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara		Tempat/Instansi
	Setiawan, S.E., M.M	Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPGG) wilayah Lampung dan Bengkulu	2026		Pemenuhan Gizi wilayah Lampung dan Bengkulu, Bandar Lampung.
4.	Muhammad Risyad Feradil	Hubungan Masyarakat (Humas) KPPG wilayah Lampung dan Bengkulu	4 Maret 2026		Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah Lampung dan Bengkulu, Bandar Lampung.
5.	Ike Yulinar, S.Pd	Wakil kesiswaan dan pengawasn pelaksanaan program MBG SMKN 5 Bandar Lampung	28 Januari 2026		SMK Negeri 5 Kota Bandar Lampung
6.	Susmiyatin, M.Pd.I	Tim pengawas keamanan pangan program MBG SMPN 31 Bandar Lampung	9 Februari 2026		SMP Negeri 31 Bandar Lampung
7.	Sabrina Putri	Siswi SMPN 31 Bandar Lampung	9 Februari 2026		SMPN 31 Bandar Lampung
8.	Olivia Farah	Siswi SMPN 31 Bandar Lampung	9 Februari 2026		SMPN 31 Bandar Lampung
9.	Aisyah Effendita	Siswi SMK Negeri 5 Bandar Lampung	28 Januari 2026		SMKN 5 Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui proses pengamatan di lapangan, yang kemudian dikumpulkan dengan cara membaca arsip dokumentasi, melihat, mendengarkan, serta melalui spanduk, surat-surat, hasil rekaman, dan sumber-sumber berita. Data-data yang dapat dijadikan informasi untuk penelitian ini berupa profile SPGG Kecamatan Sukabumi, laporan pelaksanaan program MBG di Kecamatan Sukabumi, petunjuk teknis program MBG, dan dokumen lain terkait program, serta informasi berita dari media massa yang berkaitan dengan program MBG.

Tabel 4. Dokumentasi Penelitian

No.	Nama Dokumen	Data yang Didapat
1.	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN)	Dasar hukum pembentukan BGN sekaligus pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
2.	Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis	Dasar hukum penyelenggaraan program MBG di Indonesia
3.	Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional RI Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026	Aturan teknis pelaksanaan program, standar gizi, anggaran, mekanisme distribusi, serta SOP penyelenggaraan.
4.	Dokumentasi data dan kegiatan	Data dan foto kegiatan pelaksanaan

No.	Nama Dokumen	Data yang Didapat
		program MBG.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Karena sulit mencapai tujuan penelitian tanpa data yang andal dan relevan, metode pengumpulan data merupakan bagian penting dari setiap proyek. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan tahap penting untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Pada tahap ini, data dikumpulkan langsung dari lingkungan alami sementara kerangka kerja, sumber, dan teknik pengumpulannya ditentukan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Tujuan observasi adalah untuk mendapatkan wawasan langsung tentang topik atau peristiwa yang diteliti. Observasi dijadikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara akurat bagaimana program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) dilaksanakan di wilayah Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana anak-anak dan pelaksana menyiapkan, mengolah, menyajikan, dan menyantap makanan sehat di kelas. Metode ini memungkinkan dokumentasi menyeluruh dari sejumlah kegiatan, termasuk respons siswa terhadap makanan yang disajikan, peran staf dan penerapan prosedur operasi standar (SOP), serta kesiapan fasilitas dan infrastruktur dapur yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan (SPPG).

2. Wawancara

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, terperinci, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, maka peneliti melakukan wawancara mendalam, yaitu tanya jawab secara langsung antara informan dengan peneliti. Pemilihan informan yang akan diwawancarai oleh peneliti

ditentukan dengan melihat peran dan informasi tersebut yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi pendukung tentang pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sekaligus memberikan bukti nyata mengenai bagaimana program MBG diimplementasikan oleh pihak pelaksana. Selain itu, dokumentasi juga membantu peneliti dalam menelusuri kesesuaian antara pelaksana program dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam aspek keamanan pangan dan standar penyediaan makanan.

3.6 Teknik Analisis Data

Fase krusial dalam penelitian adalah analisis data, yang mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang memajukan pengetahuan dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Fadhil (2021) mendefinisikan analisis data sebagai tindakan pengumpulan dan penyusunan informasi secara metodis dari berbagai sumber, termasuk observasi lapangan, wawancara, dokumen, foto, dan sumber lainnya. Metode yang diciptakan oleh Miles digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan meliputi:

1. Reduksi Data

Tahap awal analisis disebut reduksi data. Dalam tahap ini, informasi yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih, diringkas, dan disederhanakan. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menarik perhatian pada informasi relevan yang paling krusial untuk mendukung analisis yang sejalan dengan fokus penelitian. Bahkan sebelum pengumpulan data selesai, minimisasi data adalah proses yang berkelanjutan.

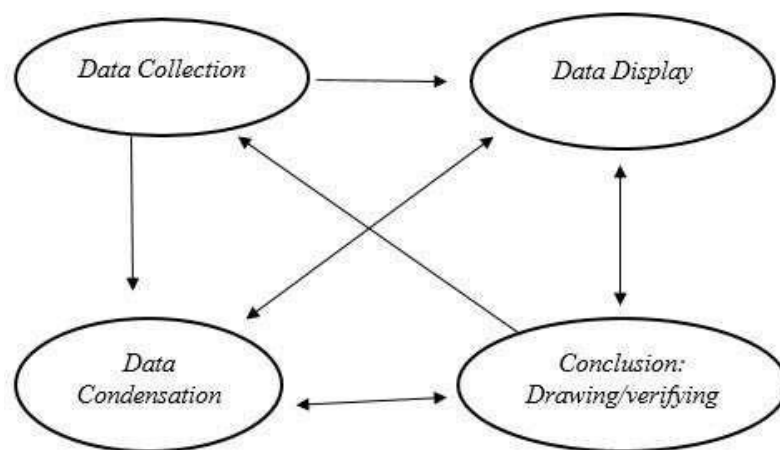
2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi, data ditampilkan dalam bentuk tabel, bagan, atau narasi. Berkat penyajian ini, peneliti dapat lebih mudah menemukan tren,

korelasi, dan pola dalam data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk menampilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pelaksanaan program MBG di Kecamatan Sukabumi, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga hasil yang dicapai.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari data yang telah disajikan merupakan tahap terakhir. Temuan penelitian yang membahas prioritas dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dimasukkan ke dalam kesimpulan ini. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) untuk mendasari dan memvalidasi kesimpulan mereka.



Gambar 7. Komponene Analisis Data: Model Interaktif Miles & Huberman

Sumber: Miles & Huberman (1994) dalam Miles dkk. (2014)

3.7 Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Pada penelitian ini, pengujian kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

a. Perpanjangan Pengamatan

Melakukan lebih banyak pengamatan di tempat dan wawancara berulang, periode pengamatan diperpanjang untuk meningkatkan keandalan data. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mendatangi kembali sekolah penerima Program MBG, tetapi juga melakukan pengamatan langsung di

dapur penyedia gizi (SPPG) serta memperdalam wawancara dengan pihak kecamatan Sukabumi sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan program. Selain itu, peneliti juga menambah informan dari kalangan siswa dan orang tua penerima manfaat untuk memperoleh data yang lebih beragam dan komprehensif.

b. Triangulasi Data

Berdasarkan Moleong dalam Hadi (2016) dengan membandingkan atau mencocokkan data dengan jenis data atau sumber lain, proses yang dikenal sebagai triangulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan data. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metodologi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi informasi. Berikut teknik triangulasi yang dipakai:

- a) Triangulasi Sumber, yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Dilakukan dengan memeriksa konsistensi data dari berbagai informan, seperti kecamatan Sukabumi, SPGG, pihak sekolah, siswa, dan orang tua.
- b) Triangulasi teknik, yaitu Menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengukur kejadian yang sama dikenal sebagai triangulasi teknis. Kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam studi ini. Sebagai contoh, temuan observasi langsung di lokasi dan dokumentasi implementasi program dibandingkan dengan data distribusi makanan yang diperoleh dari wawancara.

2. Uji Transferabilitas

Sejauh mana temuan penelitian dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi dikenal sebagai transferabilitas. Hasilnya, laporan peneliti tentang pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sukabumi menyeluruh, mudah dipahami, dan terorganisir. Uraian ini meliputi latar belakang, mekanisme pelaksanaan, hingga kendala yang muncul di lapangan. Dengan deskripsi yang mendalam, diharapkan pembaca dapat menilai relevansi penelitian ini dan mempertimbangkan penerapan atau perbandingan dengan program serupa di wilayah lain.

3. Uji Dependabilitas

Dependabilitas menyoroti pentingnya ketertelusuran di seluruh proses penelitian untuk memastikan bahwa temuan dapat diverifikasi secara independen oleh ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan setiap tahapan penelitian, mulai dari penentuan fokus masalah, pemilihan informan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Seluruh proses tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memastikan ketepatan langkah yang ditempuh. Bukti pendukung seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumentasi kegiatan juga dilampirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Konfirmabilitas bertujuan menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar didasarkan pada data lapangan, bukan sekadar interpretasi subjektif peneliti. Sehingga, peneliti menyajikan kutipan langsung dari informan, membandingkannya dengan dokumen resmi seperti juknis MBG, serta mencocokkannya dengan hasil observasi. Dengan cara ini, objektivitas penelitian dapat dipertahankan sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipercaya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) studi pada satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program MBG di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung oleh SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah belum berjalan dengan optimal. Meskipun telah didukung oleh standar dan sasaran yang jelas berdasarkan kebijakan nasional seperti Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG, dan keputusan Kepala BGN No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis tata kelola penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026, anggaran yang memadai, dan struktur organisasi yang sesuai dengan Juknis. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), masih ditemukan kelemahan pada beberapa variabel penting, seperti pada variabel standar dimana belum dipatuhinya standar operasional di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana yang belum efektif, ketimpangan tingkat pemahaman di antara para pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial berupa respon masyarakat yang beragam dan terganggunya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, meskipun implementasi program MBG secara umum sudah membantu siswa/i dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar, efektivitasnya belum optimal. Hal ini

disebabkan pula oleh belum terbangunnya pelaksanaan program yang konsisten dan terintegrasi di seluruh tahapan penyelenggaraan program MBG.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Sukabumi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi meliputi ketidakpatuhan terhadap standar yang ditunjukkan oleh ketidakkonsistenan dalam pemenuhan standar keamanan pangan dan ketepatan waktu distribusi, pemahaman pelaksana yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem monitoring dan pengawasan. Selain itu, pelaksanaan program juga menghadapi kendala operasional berupa keterlambatan distribusi dan kualitas makanan yang belum konsisten, serta kendala eksternal berupa ketidakstabilan ketersediaan dan harga bahan pangan. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi permasalahan pada berbagai tahapan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga efektivitas penyelenggaraan program dalam mencapai tujuan yang diharapkan masih menghadapi berbagai kendala.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan program MBG pada Satuan Pelayanan Pelayan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah dan SPPG Yayasan Insan Sehat Mandiri, disarankan untuk lebih memperhatikan konsistensi pelaksanaan program sesuai petunjuk teknis, terutama dalam proses produksi, distribusi, dan pengawasan kualitas makanan. Selain itu, pemberian pembekalan kepada relawan perlu dilakukan secara lebih merata agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas. SPPG juga perlu memperkuat pengaturan waktu distribusi dan memperluas kerja sama dengan pemasok lokal untuk kestabilan bahan pangan.

2. KPPG Wilayah Kerja Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung, disarankan untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan program MBG di setiap SPPG. Pengawasan tersebut perlu didukung dengan evaluasi berkala agar kendala yang muncul dalam pelaksanaan program segera dapat ditangani. Selain itu, KPPG diharapkan dapat mendukung penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.
3. Sekolah disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan pihak SPPG terkait waktu distribusi makanan agar pelaksanaan program tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga diharapkan dapat membantu pengawasan dalam pendistribusian makanan kepada siswa sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih tertib dan sesuai sasaran.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis implementasi program MBG menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga belum mengukur secara kuantitatif dampak program terhadap status gizi penerima manfaat maupun efektivitas pelaksanaannya secara terukur. Selain itu, keterbatasan akses dan ketersediaan data pada SPPG Yayasan Asri Amanah Barokah sebagai lokasi utama penelitian menyebabkan peneliti menggunakan data tambahan dari SPPG Yayasan Insan Sehat Mandiri sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* serta memperluas cakupan lokasi penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan dampak program MBG pada berbagai karakteristik wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2017). Peranan manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi. *Warta Dharmawangsa*, (51).
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.243>
- Agustino L. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Cv Alfabet.
- Al Farisi, S. (2023). Implementasi qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang pemerintahan mukim (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Alfikri, M. Y. (2025). Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian, Teori dan Relevansi dalam Era Digital. *Jurnal Menulis*, 5(1), 10-25.
- Ananta, D. N. P., & Nadhira, S. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SMA Swasta Lancang Kuning Kota Dumai). *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 7(2), 335-349.
<https://doi.org/10.36917/japabis.v7i2.409>
- Aprillia, N. P., & Azzahra, M. U. D. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara legacy project dan solusi stunting. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 4(5), 19-22.
<https://doi.org/10.4444/jisma.v4i5.1229>
- Badan Gizi Nasional. (2025). SPPG operasional: Daftar satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah operasional. Diakses pada 24 September 2025 <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg>
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2025). Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. Jakarta: Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.
- Besar, G. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- BPHN Dorong Enam Dimensi untuk Analisis dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. (2025, Maret 17). Retrieved Oktober 30, 2025, from [bphn.go.id: https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-dorong-enam-dimensi-untuk-analisis-dan-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis](https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-dorong-enam-dimensi-untuk-analisis-dan-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis)

- Dye, Thomas R. (1992), *Understanding Public Policy*, Prince Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, United State of America, 1992
- Dzakiah, A. N., Andryandy, T., Kuswanto, F. R. H., & Syahrevi, I. (2025). Strategi Public Relations Politik Pemerintahan Prabowo Dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6885-6899. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2312>
- Febryanti, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Studi kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 218199.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470-478. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556>
- Irawati, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengaturan Kerja Fleksibel Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Publik*, 15(2), 49-57. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i2.54>
- Joko Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik :Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Ghalis Indonesia.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Kholida, N. F., Hidayati, I. L., & Pramudya Kurnia, S. T. P. (2013). *Perbedaan Status Gizi Anak Sekolah Sebelum dan Sesudah PMT-AS di SDN Banyuanyar III Kota Surakarta Tahun 2012* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Khonsa'Gholiyah, N., & Ma'ruf, M. F. (2024). Koordinasi Bakorwil II Bojonegoro dalam pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 12(3), 681–692. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p681-692>
- Lampungsuara.com. (2025, 4 September). Ratusan siswa di Bandar Lampung keracunan MBG: Pemerintah tanggung biaya, kondisi dapur terungkap. Diakses pada 24 September 2025 <https://lampung.suara.com/read/2025/09/04/161654/ratusan-siswa-di->

bandar-lampung-keracunan-mbg-pemerintah-tanggung-biaya-kondisi-dapur-terungkap

- LampungOne. (2024). Prevalansi stunting di Bandar Lampung capai 13 persen, di bawah target nasional. Diakses pada 24 September 2025 <https://lampungone.co/prevalansi-stunting-di-bandarlampung-capai-13-persen-di-bawah-target-nasional/>
- Leo, Agustino. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. 2008.
- Liputan6.com. (2025, 10 September). 247 siswa di Lampung keracunan diduga akibat makanan tercemar bakteri E.coli, dapur MBG ditutup sementara. Diakses pada 24 September 2025 <https://www.liputan6.com/regional/read/6155218/247-siswa-di-lampung-keracunan-diduga-akibat-makanan-tercemar-bakteri-ecoli-dapur-mbg-ditutup-sementara>
- Lestari, A. W., Amma, G. M., & Firdausi, F. (2024). Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 62-70. <https://doi.org/10.30649/aamama.v27i1.234>
- Maharani, A. S., Hartono, S., & Widiyanto, M. K. (2025). Implementasi Perwali Surabaya No. 106 Tahun 2022 Tentang Pengumpulan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin: Studi Kasus Di Kecamatan Sawahan. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 5(01), 17-22. <https://doi.org/10.69957/paob.v5i01.2106>
- Maulana & Nugroho (2019). Kebijakan Publik. Serang: CV. AA. RIZKY
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2).
- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik. Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Muhammad Fadhil, M. F. (2021). Implementasi manajemen strategi kepala madrasah untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru (Doctoral dissertation, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. M Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap

- Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. Indonesian journal of intellectual publication, 5(2), 130-137. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>
- Pujiyanto, A., & Solihat, M. (2026). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 7(1), 115-128. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2312>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 173, 22 hlm.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Lembaran Negara Tahun 2025, Nomor 268815 A, 30 hlm.
- Rahayu, L. F. (2025). Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 815-831. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.381>
- Rahmayunita, H. (2025, September 29). Apa Itu SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis? Intip Tugas dan Gajinya. Diakses pada 30 Oktober 2025, dari suara.com: https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/29/140229/apa-itu-sppg-dalam-program-makan-bergizi-gratis-intip-tugas-dangajinya#goog_rewarded
- Rambe, M. T., Ritonga, R. A., Harahap, T., & Sitio, R. (2026). Pemetaan Awal Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu: Perspektif Manajemen SDM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5177-5184. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4580>
- Rian Diana, Stefania Widya Setyaningtyas, & Agnessia Nanda Arimbi. (2025). Food Preferences, Eating Habits, and Nutritional Status of Full-Day School Students in Urban Areas . *Amerta Nutrion*, 9(1), 169–175.
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(2), 131-143. <https://doi.org/10.61813/jhap.v3i2.216>
- Lilianti, L., Asrul, A., Adenisatrawan, A., & Said, H. (2021). Implementasi kebijakan SD-SMP negeri satu atap: Mengapa dan bagaimana. Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 21(1). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v2i1l.6162>
- Sari, S. M. (2025). Implementation of the free nutritious meal policy in Bondowoso Regency. *Journal Publicuho*, 8(3), 1898–1907. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.896>

- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Semua Dapur MBG di Bandar Lampung Belum Kantongi Sertifikat Laik Higeine Sanitasi. (2025, Oktober 27). Diakses pada 30 Oktober 2025, dari berdikari.co: <https://www.berdikari.co/2025/10/27/semua-dapur-mbg-di-bandar-lampung-belum-kantongi-sertifikat-laik-higiene-sanitasi>
- Situmorang, Chazali. H (2016) *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)*. Social Security Development Institute (SSDI). ISBN 978-602-74018-1-5.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiannor, S. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 2(2), 1–33. <https://doi.org/10.24239/madika.v2i2.1357>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A policy implementation review of the free nutritious meal (MBG) program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara.
- Tahir, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Gorontalo: UNG Press.
- Utami, N. T., Wolor, C. W., & Marsofiyati, M. (2024). Analisis Kepatuhan Kerja Anggota di Polsek Pademangan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 70-82. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2267>
- Winarno, B. (2008). *Implementasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 426-435.